



Rancangan Awal

RENCANA KERJA (RENJA)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

TAHUN 2022



Disusun oleh :

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan. Penyusunan Renja ini berpedoman kepada Rencana Strategik (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Periode tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang merupakan kebutuhan kinerja yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Visi Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya Misi ke 3.

Semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan pedoman bagi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam memenuhi target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut, agar mampu memberikan kontribusi positif bagi Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juni 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KABUPATEN MOJOKERTO



Dr. MIEKE JULI ASTUTI, Msi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640731 199003 2005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i.....i

Daftar Isi ii.....ii

BAB I PENDAHULUAN1

1.1. Latar Belakang1

1.2. Landasan Hukum.....2

1.3. Maksud dan Tujuan.....4

1.4. Sistematika Penulisan.....4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tupoksi SKPD.....19

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....28

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....28

3.2. Tujuan dan SasaranPerangkat Daerah.....28

3.3. Program dan Kegiatan.....30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....37

BAB V PENUTUP46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta melaksanakan kegiatan atas usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indicator kinerja dan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternative dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana

pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Berdasarkan Tupoksinya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran Visi dan Misi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien serta akuntabel sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, factual dan realistis.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- b. Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah ;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2016-2022;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2022;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).
- p. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah dengan menentukan sasaran indikator dan penetapan kinerja dalam bentuk Penyusunan Program kegiatan, menentukan Lokasi kegiatan dan menyusun Indikator Kinerja kegiatan serta menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode Satu tahun pada tahun yang akan datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Ada pun tujuannya sebagaimana renstra yang telah ditetapkan adalah ***Meningkatkan Ajukuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan di Kabupaten Mojokerto*** demi terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Usulan Program dan Kegiatan beserta pagu pendanaannya. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran apa bila tidak sesuai dengan kebutuhan; serta kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPKAD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BPKAD

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra SKPD. Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 pada umumnya dapat tercapai hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bernilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pencapaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan serta indikator kinerja OPD dengan Tujuan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan di Kabupaten Mojokerto dengan Sasaran meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan program dan kegiatan sebagaimana kami gambarkan dalam Tabel T-C-29 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan) berikut :

TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN MOJOKERTO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2011-2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (N-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)					
					Target Renja BPKAD (N-2)	Realisasi Renja BPKAD (N-2)	Tingkat Realisasi 1 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
4										
4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan								
4	04	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
4	04	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	239,638,485,280	119,819,242,640	100%	59,909,621,320	419,367,349,240	0%
		02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	235,338,984,000	117,669,492,000	100%	58,834,746,000	58,834,746,000	0%
		06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional		100%	140,000,000	70,000,000	100%	35,000,000	35,000,000	0%
		10 Penyediaan Alat Tulis Kantor		100%	400,000,000	200,000,000	100%	100,000,000	100,000,000	0%
		11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	520,000,000	260,000,000	100%	130,000,000	130,000,000	0%
		13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	800,000,000	400,000,000	100%	200,000,000	200,000,000	0%
		15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	40,000,000	20,000,000	100%	10,000,000	10,000,000	0%
		17 Penyediaan Makanan dan Minuman		100%	560,000,000	280,000,000	100%	140,000,000	140,000,000	0%
		21 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah		100%	1,091,220,000	545,610,000	100%	272,805,000	272,805,000	0%
		23 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja		100%	748,281,280	374,140,640	100%	187,070,320	187,070,320	0%
4	04	02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	720,000,000	360,000,000	100%	180,000,000	180,000,000	0%
		22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		100%	100,000,000	50,000,000	100%	25,000,000	25,000,000	0%
		24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		100%	440,000,000	220,000,000	100%	110,000,000	110,000,000	0%
		24 Pemeliharaan Rutin — / — Berkala — Peralatan Gedung Kantor		100%	180,000,000	90,000,000	100%	45,000,000	45,000,000	0%
4	04	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	240,000,000	120,000,000	100%	60,000,000	60,000,000	0%
		02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		100%	100,000,000	50,000,000	100%	25,000,000	25,000,000	0%
		05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		100%	140,000,000	70,000,000	100%	35,000,000	35,000,000	0%
4	04	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	800,000,000	400,000,000	100%	200,000,000	200,000,000	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Restra SKPD) tahun 2011-2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (N-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2021)		
					Target Renja BPKAD (N-2)	Realisasi Renja BPKAD (N-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	
4	05	19 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Opd yang melaksanakan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	10,679,414,400	5,339,707,200	5,339,707,200	100%	2,669,853,600	2,669,853,600	0%
		01 Pengurusan Penerbitan IMB	Jumlah IMB yang diterbitkan 100 Persen	100%	727,982,000	363,991,000	363,991,000	100%	181,995,500	181,995,500	0%
		02 Inventarisasi dan Koordinasi Penggunaan Serta Pemanfaatan Tanah dan Gedung Bangunan	Dokumen Hasil Inventarisasi	100%	1,072,018,000	536,009,000	536,009,000	100%	268,004,500	268,004,500	0%
		03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Daftar Rencana Kebutuhan BMD	100%	360,000,000	180,000,000	180,000,000	100%	90,000,000	90,000,000	0%
		04 Percepatan Pengurusan Legalisasi Dokumen Pertanahan	Terbitnya sertifikat tanah hak pakai Penda.	100%	2,522,534,400	1,261,267,200	1,261,267,200	100%	630,633,600	630,633,600	0%
		05 Penanganan Kerugian Pemerintah	Ketetapan kerugian Penda serta penyetoran kerugian Penda tepat waktu.	100%	720,000,000	360,000,000	360,000,000	100%	180,000,000	180,000,000	0%
		06 Pemanfaatan dan Penilaian Barang Milik Daerah	Aset BMD yang dimanfaatkan 12 Bulan dan Terselenggaranya Penilaian Barang Milik daerah oleh Jasa Appraisal secara benar dan akurat sebagai dasar penyusunan Neraca.	100%	1,620,000,000	810,000,000	810,000,000	100%	405,000,000	405,000,000	0%
		07 Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan BMD	Update menu Aplikasi pengelolaan BMD.	100%	846,000,000	423,000,000	423,000,000	100%	211,500,000	211,500,000	0%
		08 Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen terkait pemindahtanganan	100%	720,000,000	360,000,000	360,000,000	100%	180,000,000	180,000,000	0%
		09 Peningkatan Penanganan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan penatausahaan dengan benar	100%	990,000,000	495,000,000	495,000,000	100%	247,500,000	247,500,000	0%
		10 Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Idle	Jumlah Aset BMD yang diamankan 12 Bulan dan Jumlah Aset Idlel Daerah yang di dipelihara.	100%	614,880,000	307,440,000	307,440,000	100%	153,720,000	153,720,000	0%
		11 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan	100%	486,000,000	243,000,000	243,000,000	100%	121,500,000	121,500,000	0%
4	05	23 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Persentase OPD yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai SAP	100%	6,812,000,000	3,406,000,000	3,406,000,000	100%	1,703,000,000	1,703,000,000	0%
		01 Pengelolaan SP2D On Line	Terciptanya koordinasi dan Finalisasi Laporan Keuangan bulanan dan Tahunan pada SKPD secara benar dan tepat waktu.	100%	1,030,000,000	515,000,000	515,000,000	100%	257,500,000	257,500,000	0%
		02 Pembinaan Perbendaharaan SKPD	Terciptanya koordinasi antara BUD dan SKPD terhadap permintaan SPM menjadi SP2D secara benar dan tepat waktu.	100%	792,000,000	396,000,000	396,000,000	100%	198,000,000	198,000,000	0%
		03 Peningkatan Pengelolaan Kas.	Terbit Administrasi dan penyajian pengelolaan kas dapat dilakukan secara akurat, benar dan akuntabel	100%	810,000,000	405,000,000	405,000,000	100%	202,500,000	202,500,000	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Restra SKPD) tahun 2011-2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (N-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target Renja BPKAD (N-2)	Realisasi Renja BPKAD (N-2)	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Capaian Target Renstra Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	
	03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Pelaksanaan pengiriman peserta BinteK dan Diklat guna Peningkatan SDM Aparatur.	100%	800,000,000	400,000,000	400,000,000	100%	200,000,000	200,000,000	0%	
04	05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD	100%	180,000,000	90,000,000	90,000,000	100%	45,000,000	45,000,000	0%	
	05 Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	100%	180,000,000	90,000,000	90,000,000	100%	45,000,000	45,000,000	0%	
04	05 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian Program dan Kegiatan pada Dokumen Penganggaran terhadap Dokumen Berencanaan	100%	6,912,000,000	3,456,000,000	3,456,000,000	100%	1,728,000,000	1,728,000,000	0%	
	06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Penyusunan Raperda tentang APBD sesuai sasaran dan tepat waktu.	100%	522,000,000	261,000,000	261,000,000	100%	130,500,000	130,500,000	0%	
	07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Raperda tentang Penjabaran APBD sesuai sasaran dan tepat waktu	100%	648,000,000	324,000,000	324,000,000	100%	162,000,000	162,000,000	0%	
	08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD sesuai sasaran dan tepat waktu	100%	504,000,000	252,000,000	252,000,000	100%	126,000,000	126,000,000	0%	
	09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penyusunan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai sasaran dan tepat waktu	100%	612,000,000	306,000,000	306,000,000	100%	153,000,000	153,000,000	0%	
	21 Penyusunan KUA-PPA	Tersusunnya KUA-PPA sesuai sasaran dan tepat waktu.	100%	540,000,000	270,000,000	270,000,000	100%	135,000,000	135,000,000	0%	
	22 Penyusunan KUPA-PPAP	Tersusunnya KUPA-PPAP sesuai sasaran dan tepat waktu.	100%	486,000,000	243,000,000	243,000,000	100%	121,500,000	121,500,000	0%	
	24 Sosialisasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD	Terlaksananya Sosialisasi Rancangan APBD dan PAPBD tepat waktu.	100%	198,000,000	99,000,000	99,000,000	100%	49,500,000	49,500,000	0%	
	26 Penunjang Administrasi DPA SKPD	Penyusunan DPA SKPD sesuai ketentuan Pemendagri.	100%	360,000,000	180,000,000	180,000,000	100%	90,000,000	90,000,000	0%	
	30 Penyusunan Nota Keuangan	Dokumen Nota Keuangan	100%	180,000,000	90,000,000	90,000,000	100%	45,000,000	45,000,000	0%	
	54 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Hasil sosialisasi	100%	432,000,000	216,000,000	216,000,000	100%	108,000,000	108,000,000	0%	
	58 Asistensi / Inventarisasi RKA APBD dan Sinkronisasi Anggaran	Terlaksananya Asistens/inventarisasi RKA dan sinkronisasi Anggaran pada SKPD sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.	100%	1,350,000,000	675,000,000	675,000,000	100%	337,500,000	337,500,000	0%	
	59 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Peraturan Bupati yang Disusun	100%	270,000,000	135,000,000	135,000,000	100%	67,500,000	67,500,000	0%	
	60 Evaluasi dan Penyusunan Peningkatan Pendapatan Pembiayaan Daerah	Dokumen Hasil Investasi	100%	360,000,000	180,000,000	180,000,000	100%	90,000,000	90,000,000	0%	
	61 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Dokumen evaluasi atas investasi 100 Persen	100%	450,000,000	225,000,000	225,000,000	100%	112,500,000	112,500,000	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Restra SKPD) tahun 2011-2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (N-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target Renja BPKAD (N-2)	Realisasi Renja BPKAD (N-2)	Tingkat Realisasi I (%)		Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	04 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu.	100%	550.000.000	275.000.000	275.000.000	100%	137.500.000	137.500.000	0%
	05 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu.	100%	440.000.000	220.000.000	220.000.000	100%	110.000.000	110.000.000	0%
	06 Verifikasi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.	Tertaksananya Verifikasi Administrasi sesuai ketentuan dan tepat waktu.	100%	450.000.000	225.000.000	225.000.000	100%	112.500.000	112.500.000	0%
	07 Koordinasi, Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD, SKPKD dan LKPD	Perbaikan dan efisiensi pelaporan	100%	780.000.000	390.000.000	390.000.000	100%	195.000.000	195.000.000	0%
	08 Asistensi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan	Terciptanya pendampingan kepada SKPD dalam pengelolaan Keuangan Daerah	100%	280.000.000	140.000.000	140.000.000	100%	70.000.000	70.000.000	0%
	09 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100%	200.000.000	100.000.000	100.000.000	100%	50.000.000	50.000.000	0%
	10 Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik	100%	1.080.000.000	540.000.000	540.000.000	100%	270.000.000	270.000.000	0%
	11 Fasilitas Dana Perimbangan		100%	400.000.000	200.000.000	200.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	0%
Jumlah				265.981.899,680	132.990.949,840	132.990.949,840	8	66.495.474,920	425.953.202,840	0%

Dari tabel diatas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut :

Penjelasan Penjabaran Tabel diatas :

Dari tabel diatas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut :

1. Target Indikator Kinerja Program pada Bidang Anggaran adalah Persentase kesesuaian Program dan Kegiatan terhadap Dokumen Perencanaan

Pada tahun 2020 lalu BPKAD menargetkan 100 % atas kesesuaian Program dan Kegiatan terhadap Dokumen Perencanaan. Pencapaian target ini didasarkan pada Siklus Penyusunan APBD dan PABD dalam Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari target capaian yang ditetapkan tersebut dapat dikatakan **tercapai** karena Penyusunan APBD 2019 didukung Program dan Kegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA dan Prioritas Platon Anggaran sesuai RKPD Pemerintah Daerah.

Pencapai atas target Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 13 (tiga belas) kegiatan, yaitu :

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Raperda tentang APBD
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
3. Penyusunan Raperda tentang PABD
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran PABD
5. Penyusunan KUA-PPA
6. Penyusunan KUPA-PPAP
7. Kegiatan Asistensi/Inventarisasi RKA APBD dan Sinkronisasi Anggaran
8. Sosialisasi Rancangan APBD dan PABD
9. Penunjang Administrasi DPA SKPD
10. Penyusunan Nota Keuangan
11. Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
12. Asistensi/Inventarisasi RKA APBD dan Sinkronisasi Anggaran
13. Penyusunan Perbup tentang Penetapan Penggunaan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

14. Evaluasi dan Penyusunan Peningkatan Pendapatan Pembiayaan Daerah

Dari pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk mencapai Indikator Kinerja "Prosentase kesesuaian Program dan kegiatan terhadap Dokumen Perencanaan" dapat dikategorikan **sangat berhasil dengan capaian kinerja 100%**, hal ini dapat digambarkan bahwa Rancangan keberhasilan dari pencapaian hasil Indikator tersebut bahwa Rancangan APD telah disajikan sesuai program dan Kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan, dimana RKA yang disusun Perangkat Daerah telah mengacu pada RKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

2. Target Indikator Kinerja Program ke 2 yaitu Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan

Pada tahun 2019 ini pemerintah Daerah telah melakukan program dan kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan bagaimana bisa meningkatkan seluruh Perangkat Daerah menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP. Dari pelaksanaan Program dan kegiatan dengan indikator Program dapat dikatakan sangat berhasil. Keberhasilan ini dapat dicapai karena penetapan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan betul-betul tepat sasaran, baik dari pembinaan, pengendalian, koordinasi maupun rekonsiliasi serta Asistensi penyusunan Laporan Keuangan kepada seluruh OPD tidak mengalami hambatan apapun. Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1. Kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD, SKPKD dan LKPD
- 2. Kegiatan Pembinaan Perbendaharaan
- 3. Kegiatan Asistensi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perbup Kebijakan Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah
- 4. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kas
- 5. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

6. Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Kegiatan Verifikasi Administrasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
8. Kegiatan Fasilitasi Dana Perimbangan
9. Kegiatan Penyusunan Raperda tentang Pertanggung jawaban
10. Kegiatan Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

3. Target Indikator Kinerja Program yang ke 3 adalah Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan

Dengan diberlakukannya Permendagri 19 Tahun 2017, maka Pemerintah Daerah menargetkan seluruh Perangkat Daerah dapat melaksanakan pengelolaan BMD tersebut sesuai amanat dalam Permendagri, dari Pendataan Aset, Penilaian Aset, Pengapusan Aset serta Pemindahhtanganan Aset. Agar Indikator tersebut dapat tercapai Bidang Pengelolaan Aset telah menetapkan Program dan beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu : **Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Kegiatan sebagai berikut :**

1. Penanganan Kerugian Pemda
2. Penyusunan Standarisasi Harga Sewa Tanah Aset Pemda.
3. Percepatan Pengurusan Legalisasi Dokumen Pertanahan
4. Penilaian Barang Milik Daerah
5. Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan BMD
6. Pengamanan Aset Barang Milik Daerah
7. Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah
8. Pemindahhtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
9. Pemeliharaan Aset Idle Daerah
10. Peningkatan kualitas Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
11. Rekonsiliasi Pendataan Aset
12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Penngunaan BMD
13. Penyusunan Perda tentang Pedoman Pengelolaan BMD
14. Kegiatan Peningkatan Penanganan Penatausahaan BMD

15. Inventarisasi Tanah dan Gedung Bangunan Tidak digunakan
16. Pengurusan Bukti Kepemilikan Gedung dan atau Bangunan

Dari pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Bidang Pengelolaan Aset tersebut, seluruh OPD telah dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta rekonsiliasi secara berkordinasi setiap bulan sehingga Target Indikator yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil sebagaimana terlihat pada Tabel T-C.29 tersebut diatas.

Dengan demikian, Dari hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto diatas, dimana telah diuraikan masing-masing sesuai Target Indikator dapat disimpulkan bahwa keberhasilan atas tercapainya Indikator Sasaran pada RPJMD yaitu Opini BPK = WTP atas Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berhasil dari tahun ke tahun. Hal ini karena didukung atas keberhasilan atas Penetapan Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang sampai dengan level Staf.

KESIMPULAN :

Berdasarkan pengukuran evaluasi kinerja yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran Belanja Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2019 adalah sebesar 90,25 % atau sebesar Rp. 67.213.888.067,- dari total pagu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 74.474.521.717,00 Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman SDM dalam proses penyusunan anggaran
2. Adanya efisiensi anggaran pada beberapa pelaksanaan kegiatan
3. Adanya regulasi proses pengadaan barang dan jasa

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penganggaran berbasis kinerja
 2. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik.
 3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan para stakeholder
- Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sedangkan Permasalahan kurangnya dari segi pencapaian kinerja untuk mewujudkan tujuan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset tidak mencapai target yang diinginkan secara optimal, dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan yang berdisiplin Ekonomi Akuntansi ;

2. Rendahnya Kualitas Pengelola Keuangan di SKPD ;

3. Kurang Berperannya Kepala SKPD se Kab. Mojokerto selaku Pengguna Anggaran yang peduli terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan di Bidang penatausahaan keuangan daerah ;

Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama dan berulang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah diperlukan solusi sebagai berikut:

1. Memberikan pendampingan, pelatihan dan pembinaan secara berkordinasi kepada para pengelola keuangan SKPD se Kab. Mojokerto ;

2. Melakukan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

3. Identifikasi faktor-faktor apa yang diharapkan mampu memberikan dukungan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi ;

4. Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang lingkup Internal BPKA dan SKPD se Kab. Mojokerto melalui Koordinasi, Komunikasi dan konsolidasi.

Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto, maka perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas SDM utamanya di Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset melalui kursus, pelatihan, asistensi dan pembinaan ;
2. Memperbaiki system pengumpulan dan pengolahan data kinerja

dalam rangka meningkatkan kualitas system pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan SKPD ;

3. Meningkatkan kualitas reviu atas Laporan Kinerja SKPD ;
4. Melakukan Validasi dan rekonsiliasi data asset dengan SKPD se Kab. Mojokerto

Dari sisi penilaian efisiensi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten telah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran karena walaupun dengan realisasi anggaran sebesar 82.73% tetapi pencapaian kinerjanya berhasil mencapai 91.3% sebagaimana dijelaskan diatas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan pada BPKAD

Berdasarkan pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta teramanatkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang juga bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Kinerja pelayanan yang telah diberikan sampai tahun 2017 adalah bahwa pengelolaan keuangan dan asset daerah telah dilakukan dengan didukung SKPD lain. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Mojokerto, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2016-2022 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BPKA harus mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2)memberikan arah dan fokus strategi yang jelas (3)menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik (4) memiliki orientasi terhadap masa depan.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai

perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rekening belanja tidak langsung yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto juga mengelola rekening-rekening belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga yang menyebabkan besarnya belanja tidak langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pembayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Selama tahun 2016 Kabupaten Mojokerto mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang di dapat dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) dan penerimaan piutang daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab yang diembannya, yang dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat permasalahan yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya laporan pengelolaan keuangan dan aset dari masing-masing SKPD
3. Terbatasnya SDM pengelola keuangan yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai Disiplin Ilmu yang diinginkan.
4. Kurang peran aktifnya Kepala SKPD selaku PA terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.
5. Kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan penunjang kerja yang dimiliki.

Sedangkan dari sisi kualitas, sebagaimana Sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini dapat dilihat dari hasil Opini atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualan (WTP), hal ini dikarenakan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana tergambar dalam Tabel T.C-30 berikut :

TABEL T.C-30
PENCAPAIAN KINERJA BPKAD

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKAD					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Analisis Capaian
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1		
1.	IT = Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator Tujuan dapat tercapai, dikarenakan Program dan Kegiatan yang diusulkan dapat berjalan sesuai harapan, dimana outcome dari Program dan Ouput dari Kegiatan targetnya terpenuhi	
2.	IS = Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran ini dapat tercapai, dapat dilihat dari temuan BPK dari tahun ketahun berkurang dari segi tata kelola keuangan dan aset	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Faktor yang mempengaruhi permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ditinjau dari:

1. Gambaran Umum Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditentukan sebagai berikut :
 - Kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia belum optimal
 - Sarana dan Prasarana kerja perlu ditingkatkan.
 - Terbatasnya dana penunjang kegiatan.
 - Pembinaan dan pendayagunaan aparatur perlu ditingkatkan
 - Belum optimalnya koordinasi antar SKPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kelembagaan:
 - Tuntutan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik
 - Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah
 - Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan
 - Adanya aset milik pemerintah daerah yang terabaikan
 - Belum optimalnya pendataan aset milik daerah
3. Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Mojokerto :
 Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016– 2021 di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat;
 2. Meningkatnya sumber daya manusia PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
 3. Meningkatnya kualitas PNS selaku pelayan masyarakat;
 4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah sekaligus membangun terwujudnya aspirasi, partisipasi dan transparansi serta keterlibatan peran serta masyarakat;
 5. Terciptanya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
 6. Terciptanya infrastruktur perekonomian dalam peningkatan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi;
 7. Tumbuh dan berkembangnya usaha agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta keterlibatan UMKM secara aktif;

8. Terjalannya hubungan harmonis dengan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
9. Terjalannya hubungan yang harmonis serta koordinasi yang efektif mulai dari Pemerintah Daerah, sampai ke tingkat pemerintahan terendah (pemerintah desa)
10. Terserapnya informasi, kreativitas dan inovasi masyarakat dan turut serta pada pembangunan daerah;
11. Meningkatnya prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan prasarana lainnya yang dapat mendukung terbentuknya SDM yang berkualitas;
12. Terciptanya keselarasan antara imtaq dan iptek yang harus dimiliki oleh semua masyarakat (pelajar);
13. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan paramedis yang kompeten;
14. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
15. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga terwujud suatu kondisi daerah yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan;
16. Meningkatnya pemberian pelayanan yang prima bagi masyarakat baik pelayanan yang bersifat perijinan maupun non perijinan;

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto. Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto. Program

RANCANGAN AWAL RENJA 2022 - BPKAD

dan kegiatan Tahun 2022 yang telah diusulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Dalam rancangan awal RKPD terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31 dimana dapat dilihat bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena adanya beberapa program dan kegiatan baru yang sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Juga besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

TABEL T-C.31
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RNCANGAN AWAL RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatorif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatorif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	URUSAN WAJIB					URUSAN WAJIB				
	BADAN PENGELOLAAN	BPKAD				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN		BPKAD		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD		81,320,000,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Sekretariat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD	81,320,000,000
	1.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Sekretariat	Jumlah rekening/tagihan telepon, listrik dan air yang terbayar 12 Bulan	100%	80,000,000,000.00	1.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Sekretariat	Jumlah rekening/tagihan telepon, listrik dan air yang terbayar 12 Bulan	80,000,000,000.00
	2.00 Penyediaan jasa pemel. Dan perijinan kend. Dinas/Operasional.	Sekretariat	Jumlah Pajak Pajak kendaraan dinas bermotor yang di bayar 12 bulan	100%	35,000,000.00	2.00 Penyediaan jasa pemel. Dan perijinan kend. Dinas/Operasional.		Sekretariat	Jumlah Pajak Pajak kendaraan dinas bermotor yang di bayar 12 bulan	35,000,000.00
	4.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat	Jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	100%	150,000,000.00	4.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor		Sekretariat	Jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	150,000,000.00
	5.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat	Jumlah Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan 12 Bulan	100%	150,000,000.00	5.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Sekretariat	Jumlah Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan 12 Bulan	150,000,000.00
	6.00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat	Jumlah Kebutuhan sarana dan prasarana peralatan kantor 5 Jenis	100%	200,000,000.00	6.00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Sekretariat	Jumlah Kebutuhan sarana dan prasarana peralatan kantor 5 Jenis	200,000,000.00
	7.00 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat	Jumlah Buku Bacaan dan Per UU 12 Bulan	100%	35,000,000.00	7.00 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Sekretariat	Jumlah Buku Bacaan dan Per UU 12 Bulan	35,000,000.00
	8.00 Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat	Jumlah makan tamu dan rapat yang disediakan 323 kotak	100%	200,000,000.00	8.00 Penyediaan makanan dan minuman		Sekretariat	Jumlah makan tamu dan rapat yang disediakan 323 kotak	200,000,000.00
	9.00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan keluar daerah	Sekretariat	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas 50 kali	100%	350,000,000.00	9.00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan keluar daerah		Sekretariat	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas 50 kali	350,000,000.00
	11.00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Sekretariat	Jumlah jasa tenaga kerja yang dibutuhkan 11 Orang	100%	200,000,000.00	11.00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja		Sekretariat	Jumlah jasa tenaga kerja yang dibutuhkan 11 Orang	200,000,000.00
2.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD	100%	525,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Sekretariat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD	525,000,000
	1.00 Pengadaan Mebeleur	Sekretariat	Jumlah Mebeler yang dibutuhkan 2 Jenis	100%	150,000,000.00	1.00 Pengadaan Mebeleur		Sekretariat	Jumlah Mebeler yang dibutuhkan 2 Jenis	150,000,000.00
	2.00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Sekretariat	Jumlah pelaksanaan perbaikan gedung kantor 12 Bulan	100%	100,000,000.00	2.00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		Sekretariat	Jumlah pelaksanaan perbaikan gedung kantor 12 Bulan	100,000,000.00
	3.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat	Jumlah Pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor 12 Bulan	100%	75,000,000.00	3.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Sekretariat	Jumlah Pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor 12 Bulan	75,000,000.00

	4.00	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat	Jumlah pakaian dinas harian 70 setel	100%	200,000,000.00	4.00	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat	Jumlah pakaian dinas harian 70 setel	200,000,000.00
3.00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Sekretariat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD	100%	120,000,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Sekretariat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD	120,000,000
	1.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sekretariat	Jumlah pakaian dinas harian 70 setel	100%	60,000,000.00	1.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sekretariat	Jumlah pakaian dinas harian 70 setel	60,000,000.00
	2.00	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Sekretariat	Jumlah pakaian Batik 70 Setel	100%	60,000,000.00	2.00	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Sekretariat	Jumlah pakaian Batik 70 Setel	60,000,000.00
4.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Sekretariat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD	100%	250,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Sekretariat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD	250,000,000
	1.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Sekretariat	pelaksanaan pengiriman peserta Birek dan Diklat guna Peningkatan SDM Aparatur.	100%	250,000,000	1.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Sekretariat	pelaksanaan pengiriman peserta Birek dan Diklat guna Peningkatan SDM Aparatur.	250,000,000
4.00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Sekretariat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD	100%	60,000,000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Sekretariat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD	60,000,000
	1.00	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Sekretariat	Jumlah laporan kinerja 5 Laporan	100%	60,000,000	1.00	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Sekretariat	Jumlah laporan kinerja 5 Laporan	60,000,000
17.00	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Bidang Anggaran	Persentase kesesuaian Program dan Kegiatan pada Dokumen Penganggaran terhadap Dokumen	100%	1,325,000,000	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Bidang Anggaran	Persentase kesesuaian Program dan Kegiatan pada Dokumen Penganggaran terhadap Dokumen	1,325,000,000
	1.00	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Bidang Anggaran	Jumlah rapenda APBD dan Perda APBD 430 buku	100%	200,000,000.00	1.00	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Bidang Anggaran	Jumlah rapenda APBD dan Perda APBD 430 buku	200,000,000.00
	2.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Bidang Anggaran	Jumlah buku Raperbub penjabaran APBD dan buku Perbub penjabaran APBD 430 buku	100%	225,000,000.00	2.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Bidang Anggaran	Jumlah buku Raperbub penjabaran APBD dan buku Perbub penjabaran APBD 430 buku	225,000,000.00
	3.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Bidang Anggaran	Jumlah buku Raperda PAPBD dan buku Perda APBD 430	100%	175,000,000.00	3.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Bidang Anggaran	Jumlah buku Raperda PAPBD dan buku Perda APBD 430	175,000,000.00
	4.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bidang Anggaran	Jumlah buku Raperbub PAPBD dan buku Perbub PAPBD 430 buku	100%	210,000,000.00	4.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bidang Anggaran	Jumlah buku Raperbub PAPBD dan buku Perbub PAPBD 430 buku	210,000,000.00
	5.00	Penyusunan KUA-PPA	Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Rancangan KUA-PPA dan Buku KUA-PPA 75 Dokumen	100%	150,000,000.00	5.00	Penyusunan KUA-PPA	Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Rancangan KUA-PPA dan Buku KUA-PPA 75 Dokumen	150,000,000.00
	6.00	Penyusunan KUPA-PPAP	Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen KUPA-PPAP dan Buku KUPA-PPAP 75 Dokumen	100%	135,000,000.00	6.00	Penyusunan KUPA-PPAP	Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen KUPA-PPAP dan Buku KUPA-PPAP 75 Dokumen	135,000,000.00
	7.00	Sosialisasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD	Bidang Anggaran	Jumlah peserta sosialisasi 144 peserta	100%	55,000,000.00	7.00	Sosialisasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD	Bidang Anggaran	Jumlah peserta sosialisasi 144 peserta	55,000,000.00
	8.00	Penunjang Administrasi DPA SKPD	Bidang Anggaran	Jumlah DPA yang di sahkan 49 DPA	100%	175,000,000.00	8.00	Penunjang Administrasi DPA SKPD	Bidang Anggaran	Jumlah DPA yang di sahkan 49 DPA	175,000,000.00
	9.00	Penyusunan Nota Keuangan	Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Nota Keuangan 1 dokumen	100%	50,000,000.00	9.00	Penyusunan Nota Keuangan	Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Nota Keuangan 1 dokumen	50,000,000.00

10.00	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Bidang Anggaran	terselenggaranya Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD tepat waktu dan sesuai ketentuan Permendagri sebagai dasar pelaksanaan tugas SKPD.	100%	120,000,000.00	10.00	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Bidang Anggaran	terselenggaranya Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD tepat waktu dan sesuai ketentuan Permendagri sebagai dasar pelaksanaan tugas SKPD.	100%	120,000,000.00
11.00	Asistensi/Inventarisasi RKA APBD dan Sinkronisasi Anggaran	Bidang Anggaran	Jumlah peserta asistensi RKA 144 Peserta	100%	375,000,000.00	11.00	Asistensi/Inventarisasi RKA APBD dan Sinkronisasi Anggaran	Bidang Anggaran	Jumlah peserta asistensi RKA 144 Peserta	100%	375,000,000.00
12.00	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Bidang Anggaran	Jumlah Perbub yang diterbitkan 12 Bulan	100%	100,000,000.00	12.00	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Bidang Anggaran	Jumlah Perbub yang diterbitkan 12 Bulan	100%	100,000,000.00
13.00	Evaluasi dan Penyusunan Peningkatan Pendapatan Pembiayaan Daerah	Bidang Anggaran	Jumlah laporan Evaluasi pembiayaan 12 Bulan	100%	125,000,000.00	13.00	Evaluasi dan Penyusunan Peningkatan Pendapatan Pembiayaan Daerah	Bidang Anggaran	Jumlah laporan Evaluasi pembiayaan 12 Bulan	100%	125,000,000.00
14.00	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Bidang Anggaran	Dokumen evaluasi atas investasi 100 Persen	100%	200,000,000.00	14.00	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Bidang Anggaran	Dokumen evaluasi atas investasi 100 Persen	100%	200,000,000.00
15.00	Monitoring dan Evaluasi DAK Non fisik	Bidang Anggaran	Hasil Evaluasi	100%	50,000,000.00	15.00	Monitoring dan Evaluasi DAK Non fisik	Bidang Anggaran	Hasil Evaluasi	100%	50,000,000.00
18.00	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Persentase Opd yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai SAP	100%	2,660,000,000	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Persentase Opd yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai SAP	100%	2,660,000,000	
1.00	Pengelolaan SP2D On line	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Daftar gaji PNS yang di cetak 12 bulan	100%	360,000,000.00	1.00	Pengelolaan SP2D On line	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Daftar gaji PNS yang di cetak 12 bulan	100%	360,000,000.00
2.00	Pembinaan Perbendaharaan dan Akuntansi	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah rekon kepada pengelola Keuangan OPD 12 bulan	100%	400,000,000.00	2.00	Pembinaan Perbendaharaan dan Akuntansi	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah rekon kepada pengelola Keuangan OPD 12 bulan	100%	400,000,000.00
3.00	Peningkatan Pengelolaan Kas	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah Laporan Realisasi Kerja yang disampaikan ke Pusat 12 bulan	100%	300,000,000.00	3.00	Peningkatan Pengelolaan Kas	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah Laporan Realisasi Kerja yang disampaikan ke Pusat 12 bulan	100%	300,000,000.00
4.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 80 Buku	100%	150,000,000.00	4.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 80 Buku	100%	150,000,000.00
5.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah dokumen Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2016 160 Buku	100%	150,000,000.00	5.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah dokumen Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2016 160 Buku	100%	150,000,000.00
6.00	Verifikasi Administrasi Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah pengajuan hibah, bansos dan bk yang diverifikasi 500 Pengajuan	100%	250,000,000.00	6.00	Verifikasi Administrasi Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah pengajuan hibah, bansos dan bk yang diverifikasi 500 Pengajuan	100%	250,000,000.00

7.00	Koordinasi, Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD, SKPKD dan LKPD	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah Dokumen rekonsiliasi laporan keuangan 49 dokumen	100%	250,000,000.00	7.00	Koordinasi, Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD, SKPKD dan LKPD	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah Dokumen rekonsiliasi laporan keuangan 49 dokumen	250,000,000.00
8.00	Asistensi/Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Peraturan KDH tentang	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan daerah 3 Pendamping	100%	75,000,000.00	8.00	Asistensi/Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Peraturan KDH tentang	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan daerah 3 Pendamping	75,000,000.00
9.00	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Pemerintah Daerah TA 2016 1 Dokumen	100%	75,000,000.00	9.00	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Pemerintah Daerah TA 2016 1 Dokumen	75,000,000.00
10.00	Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah OPD yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Sesuai SAP 48 OPD	100%	450,000,000.00	10.00	Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah OPD yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Sesuai SAP 48 OPD	450,000,000.00
11.00	Facilitasi Dana Perimbangan	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah OPD yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Sesuai SAP 48 OPD	100%	200,000,000.00	11.00	Facilitasi Dana Perimbangan	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Jumlah OPD yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Sesuai SAP 48 OPD	200,000,000.00
19.00	Program Peningkatan Pengelolaan BMD	Bidang Aset	Persentase Opd yang melaksanakan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	5,250,129,100	Program Peningkatan Pengelolaan BMD	Bidang Aset	Persentase Opd yang melaksanakan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	5,250,129,100
1.00	Pengurusan Penerimaan IMB	Bidang Aset	Jumlah IMB yang diterbitkan 100 Persen	100%	300,000,000.00	1.00	Pengurusan Penerimaan IMB	Bidang Aset	Jumlah IMB yang diterbitkan 100 Persen	300,000,000.00
2.00	Penanganan Kerugian Pemerintah Daerah	Bidang Aset	Jumlah kerugian Pemda yang di setor 48 OPD	100%	200,000,000.00	2.00	Penanganan Kerugian Pemerintah Daerah	Bidang Aset	Jumlah kerugian Pemda yang di setor 48 OPD	200,000,000.00
3.00	Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan BMD	Bidang Aset	Jumlah opd yang merencanakan kebutuhan BMD	100%	200,000,000.00	3.00	Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan BMD	Bidang Aset	Jumlah opd yang merencanakan kebutuhan BMD	200,000,000.00
4.00	Penggunaan dan pemanfaatan BMD	Bidang Aset	Dokumen Hasil Koordinasi penggunaan dan pemanfaatan Tanah dan Gedung Bangunan 100 Persen	100%	225,000,000.00	4.00	Penggunaan dan pemanfaatan BMD	Bidang Aset	Dokumen Hasil Koordinasi penggunaan dan pemanfaatan Tanah dan Gedung Bangunan 100 Persen	225,000,000.00
5.00	Pengamanan dan Pemeliharaan BMD	Bidang Aset	Jumlah BMD yang di lakukan pengman	100%	900,000,000.00	5.00	Pengamanan dan Pemeliharaan BMD	Bidang Aset	Jumlah BMD yang di lakukan pengman	900,000,000.00
6.00	Pemindahan tangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bidang Aset	Jumlah Pengurusan sertifikat tanah hak pakai di kantor Pertanahan Kab. Mojokerto 100 Persen	100%	300,000,000.00	6.00	Pemindahan tangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bidang Aset	Jumlah Pengurusan sertifikat tanah hak pakai di kantor Pertanahan Kab. Mojokerto 100 Persen	300,000,000.00
7.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bidang Aset	Jumlah BMD yang di lakukan penilaian	100%	300,000,000.00	7.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bidang Aset	Jumlah BMD yang di lakukan penilaian	300,000,000.00
8.00	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penatausahaan penggunaan BMD	Bidang Aset	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan	100%	150,000,000.00	8.00	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penatausahaan penggunaan BMD	Bidang Aset	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan	150,000,000.00
9.00	Penilaian BMD	Bidang Aset	Jumlah BMD yng dilakukan penilaian	100%	150,000,000.00	9.00	Penilaian BMD	Bidang Aset	Jumlah BMD yng dilakukan penilaian	150,000,000.00
10.00	Koordinasi dan penyusunan Stradar Hrga berdasarkan jenis dn tipe barang	Bidang Aset	Hasil koordinasi	100%	60,000,000.00	10.00	Koordinasi dan penyusunan Stradar Hrga berdasarkan jenis dn tipe barang	Bidang Aset	Hasil koordinasi	60,000,000.00

11.00	Koordinasi dan penyusunan Stradar Kebutuhan BMD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	100%	60,000,000.00	11.00	Koordinasi dan penyusunan Stradar Kebutuhan BMD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	60,000,000.00
12.00	Koordinasi dan penyusunan Rencana Kebutuhan BMD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	100%	125,000,000.00	12.00	Koordinasi dan penyusunan rencana Kebutuhan BMD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	125,000,000.00
13.00	Koordinasi dan Penyusunan rencana pemeliharaan/perawatan BMD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	100%	50,000,000.00	13.00	Koordinasi dan Penyusunan rencana pemeliharaan/perawatan BMD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	50,000,000.00
14.00	Penatausahaan BMD	Bidang Aset	Dokumen penatausahaan	100%	140,000,000.00	14.00	Penatausahaan BMD	Bidang Aset	Dokumen penatausahaan	140,000,000.00
15.00	Inventarisasi BMD	Bidang Aset	hasil inventraisasi	100%	50,000,000.00	15.00	Inventarisasi BMD	Bidang Aset	hasil inventraisasi	50,000,000.00
16.00	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan fisik, Administrasi dan Hukum BMD	Bidang Aset	Jumlah BMD yang di lakukan penilaian	100%	1,247,500,000.00	16.00	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan fisik, Administrasi dan Hukum BMD	Bidang Aset	Jumlah BMD yang di lakukan penilaian	1,247,500,000.00
17.00	Koordinasi hasil penilaian BMD	Bidang Aset	Jumlah kerugian Pemda yang di setor 48 OPD	100%	100,000,000.00	17.00	Koordinasi hasil penilaian BMD	Bidang Aset	Jumlah kerugian Pemda yang di setor 48 OPD	100,000,000.00
18.00	Koordinasi, Pengwsan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan penghapusan BMD	Bidang Aset	Jumlah kerugian Pemda yang di setor 48 OPD	100%	110,000,000.00	18.00	Koordinasi, Pengwsan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan penghapusan BMD	Bidang Aset	Jumlah kerugian Pemda yang di setor 48 OPD	110,000,000.00
19.00	Koordinasi, Pengwsan dan pengendalian atas penindhngan BMD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	100%	50,000,000.00	19.00	Koordinasi, Pengwsan dan pengendalian atas penindhngan BMD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	50,000,000.00
20.00	Koordinasi Pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan BMD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	100%	150,000,000.00	20.00	Koordinasi Pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan BMD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	150,000,000.00
21.00	Koordinasi Pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan BMD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	100%	150,000,000.00	21.00	Koordinasi Pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan BMD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	150,000,000.00
22.00	Koordinasi penyusunan laporan BMD dari SKPD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	100%	25,000,000.00	22.00	Koordinasi penyusunan laporan BMD dari SKPD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	25,000,000.00
23.00	Koordinasi dan pembinaan pengeloaab BMD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	100%	207,629,100.00	23.00	Koordinasi dan pembinaan pengeloaab BMD	Bidang Aset	Hasil koordinasi	207,629,100.00
					91,510,129,100					

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat Sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto dan dibutuhkan untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan dan asset/barang daerah adalah Nihil, karena sampai dengan saat Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan baik dari Masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi serta dari Perangkat Daerah yang ditujukan langsung kepada kami tidak ada.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.

Pada Tahun 2022, dimana merupakan tahun pertama pelaksanaan program pembangunan Visi Misi Bupati terpilih dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. APBN merupakan instrumen kebijakan penting untuk mencapai tujuan nasional dan pelaksanaan program Nawacita. Pemerintah terus berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, dengan fokus prioritas pembangunan nasional pada 2022 adalah (1) pembangunan infrastruktur; (2) pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antar-pendapatan dan antarwilayah; serta (3) perluasan kesempatan kerja. Perekonomian nasional tahun 2022 akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas. Untuk mengakselerasi perekonomian tahun 2022, Pemerintah akan merealisasikan belanja negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai prioritas dengan didukung oleh penerimaan negara yang optimal serta sumber pembiayaan yang terukur dan terkendali. Pemerintah akan terus meningkatkan penggunaan APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan agar terwujud keadilan sosial yang semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dicapai melalui peningkatan investasi yang akan terus didorong melalui kemudahan perizinan dan perbaikan iklim investasi, dengan penggunaan APBN sebagai katalis sekaligus pendorong pembangunan. Dengan demikian, tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui Misi ke 3 Rencana jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan”.

Sedangkan untuk mencapai misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto Sesuai dengan Dokumen Renstra Tahun 2016-2022 menentukan tujuan dan arah dalam melaksanakan Pembangunan sesuai dengan Tupoksinya yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik . Tujuan tersebut harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi. Tujuan Strategik tersebut adalah Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dengan Indikator Tujuan adalah Opini BPK = WTP.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Indikator berkurang temuan penyimpangan tata kelola keuangan dan aset daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah. Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan 3 (tiga) program yang diaplikasikan ke dalam kegiatan kegiatan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang direncanakan BPKAD Kabupaten Mojokerto sebagai Pelaksanaan pencapaian misi ke 2 RPJMD pada tahun 2022, terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Program ini mengusulkan Pagu pada Tahun 2022 sebesar Rp. 115.000.000.000
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini bertujuan untuk Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan dalam mengelola Laporan Keuangan Daerah. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2022 sebesar Rp. 510.000.000.000,-;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini bertujuan untuk Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aplikasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan BMD sesuai

ketentuan. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2022 sebesar Rp.2.500.000.000

Dalam Menjalankan Program tersebut harus menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat top-down didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Untuk BPKAD Indikator sasaran RPJMD adalah Opini BPK terhadap Akuntabilitas keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan target (WTP) dan untuk mempertahankan opini yang telah diraih pada tahun 2020, maka BPKAD mengusulkan beberapa kegiatan sebagaimana tertuang dalam Tabel T-C.33 berikut:

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	URUSAN/BIDANG/PRIBAD PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2022				SALINAN PENTING	PERKIRAAN/RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET SAPARAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAKET INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET SAPARAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAKET INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.04	Usulan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan		BPKAD		517,225,000,000.00				620,670,000,000.00
4.01.4.04.01	1. Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	BPKAD	100%	125,000,000.00	APBD		100%	150,000,000.00
	1.1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.		BPKAD	100%	125,000,000.00	APBD		100%	150,000,000.00
	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	BPKAD	100%	50,000,000.00	APBD		100%	60,000,000.00
	1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	BPKAD	100%	75,000,000.00	APBD		100%	90,000,000.00
	1.2 Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah.		BPKAD	100%	33,500,000,000.00	APBD		100%	40,200,000,000.00
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan tunjangan asn	Gaji yang tersalurkan	BPKAD	100%	33,500,000,000.00	APBD		100%	40,200,000,000.00
	1.3 Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.		BPKAD	100%	600,000,000.00	APBD		100%	720,000,000.00
	1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah pakaian	BPKAD	100%	100,000,000.00	APBD		100%	120,000,000.00
	1.3.2 Sosialisasi peraturan perundang- undangan	Jumlah peserta	BPKAD	100%	500,000,000.00	APBD		100%	600,000,000.00
	1.4 Kegiatan Umum Perangkat Daerah.		BPKAD		980,000,000.00	APBD		100%	1,176,000,000.00
	1.4.1 Pengadaan komponen listrik/perengkapan bangunan kantor diusulkan sebesar Rp. 35.000.000,-	Jumlah Komponen listrik	BPKAD	100%	35,000,000.00	APBD		100%	42,000,000.00

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor diusulkan sebesar Rp. 200.000.000,-	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana peralatan kantor 5 Jenis	BPKAD	100%	200,000,000.00	APBD		100%	240,000,000.00
1.4.3 Penyediaan bahan logistik kantor diusulkan sebesar Rp. 85.000.000,-	Jumlah Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan 12 Bulan	BPKAD	100%	85,000,000.00	APBD		100%	102,000,000.00
1.4.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan diusulkan sebesar Rp. 135.000.000,-	Jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	BPKAD	100%	135,000,000.00	APBD		100%	162,000,000.00
1.4.5 Penyediaan bahan bacaan dan per UU diusulkan sebesar Rp. 50.000.000,-	Jumlah Buku Bacaan dan Per UU 12 Bulan	BPKAD	100%	50,000,000.00	APBD		100%	60,000,000.00
1.4.6 Penyediaan bahan/material diusulkan sebesar Rp. 125.000.000,-	Jumlah alk	BPKAD	100%	125,000,000.00	APBD		100%	150,000,000.00
1.4.7 Fasilitas Kunjungan tamu diusulkan sebesar Rp. 100.000.000,-	Jumlah mamit tamu dan rapat yang disediakan 323 kotak	BPKAD	100%	100,000,000.00	APBD		100%	120,000,000.00
1.4.8 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD diusulkan sebesar Rp. 250.000.000,-	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas 50 kali	BPKAD	100%	250,000,000.00	APBD		100%	300,000,000.00
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah THL	BPKAD	100%	85,200,000,000.00	APBD		100%	102,240,000,000.00
1.5.1 Penyediaan jasa komunikasi, Sda dan listrik diusulkan sebesar Rp. 85.000.000.000,-	Jumlah rekening listrik dan telepon yang dibayar	BPKAD	100%	85,000,000,000.00	APBD		100%	102,000,000,000.00
1.5.2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor diusulkan sebesar Rp. 200.000.000,-	Jumlah jasa tenaga kerja yang dibutuhkan 11 Orang	BPKAD	100%	200,000,000.00	APBD		100%	240,000,000.00
1.6 Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda		BPKAD	100%	455,000,000.00	APBD		100%	546,000,000.00
1.6.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional dan jabatan diusulkan sebesar Rp. 230.000.000,-	Jumlah Pajak Pajak kendaraan dinas bermotor yang di bayar 12 bulan	BPKAD	100%	230,000,000.00	APBD		100%	276,000,000.00
1.6.2 Pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya diusulkan sebesar Rp. 150.000.000,-	Perbaikan gedung	BPKAD	100%	150,000,000.00	APBD		100%	180,000,000.00
1.6.3 Pemeliharaan/rehab sarana dan pra sarana gedung kantor dan bangunan lainnya diusulkan sebesar Rp. 75.000.000,-	Perbaikan peralatan gedung	BPKAD	100%	75,000,000.00	APBD		100%	90,000,000.00
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.		BPKAD	100%	514,100,000,000.00	APBD		100%	616,920,000,000.00
2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran daerah		BPKAD	100%	1,925,000,000.00	APBD		100%	2,310,000,000.00

	2.1.1 Koordinasi penyusunan KUA dan PPA diusulkan sebesar Rp. 175.000.000	Jumlah Kua dan Ppa	BPKAD	100%	175,000,000.00	APBD		100%	210,000,000.00
	2.1.2 Koordinasi penyusunan KUPa dan perubahan PpaS diusulkan sebesar Rp. 175.000.000	Jumlah KUPa dan PPaP	BPKAD	100%	175,000,000.00	APBD		100%	210,000,000.00
	2.1.3 Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Rka SKPD diusulkan sebesar Rp. 350.000.000	Jumlah Rka	BPKAD	100%	350,000,000.00	APBD		100%	420,000,000.00
	2.1.4 Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA SKPD diusulkan sebesar Rp. 175.000.000	Jumlah DPA yang di sahkan 49 DPA	BPKAD	100%	175,000,000.00	APBD		100%	210,000,000.00
	2.1.5 Koordinasi dan penyusunan Perda APBD dan Perkada tentang Penjabbran APBD diusulkan sebesar Rp. 400.000.000	Perda APBD	BPKAD	100%	400,000,000.00	APBD		100%	480,000,000.00
	2.1.6 Koordinasi dan penyusunan Perda PaPBD dan Perkada tentang Penjabbran PaPBD diusulkan sebesar Rp. 400.000.000	Perbup APBD	BPKAD	100%	400,000,000.00	APBD		100%	480,000,000.00
	2.1.7 Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang anggaran diusulkan sebesar Rp. 75.000.000	Kebijakan Bidang anggaran	BPKAD	100%	75,000,000.00	APBD		100%	90,000,000.00
	2.1.8 Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan diusulkan sebesar Rp. 175.000.000	Dokumen pembiayaan	BPKAD	100%	175,000,000.00	APBD		100%	210,000,000.00
	2.2 Koordinasi pengelolaan Perbendaharaan Daerah		BPKAD	100%	1,375,000,000.00	APBD		100%	1,650,000,000.00
	2.2.1 Koordinasi dan pengelolaan kas daerah diusulkan sebesar Rp. 275.000.000	Dokumen pengelolaan kas	BPKAD	100%	275,000,000.00	APBD		100%	330,000,000.00
	2.2.2 Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya diusulkan sebesar Rp. 175.000.000	Dokumen asistensi	BPKAD	100%	175,000,000.00	APBD		100%	210,000,000.00
	2.2.3 Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jawaban sub kegiatan diusulkan sebesar Rp. 175.000.000	Dokumen Penerimaan dan pengeluaran	BPKAD	100%	175,000,000.00	APBD		100%	210,000,000.00

	2.2.4 Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Daerah diusulkan sebesar Rp. 750.000.000	Jumlah peserta	BPKAD	100%	750.000.000.00	APBD		100%	900.000.000.00
	2.3 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan Daerah		BPKAD	100%	800.000.000.00	APBD		100%	960.000.000.00
	2.3.1 Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban diusulkan sebesar Rp. 250.000.000	dokumen rekon	BPKAD	100%	250.000.000.00	APBD		100%	300.000.000.00
	2.3.2 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPa SKPD diusulkan sebesar Rp. 75.000.000	dokumen laporan keuangan	BPKAD	100%	75.000.000.00	APBD		100%	90.000.000.00
	2.3.3 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 300.000.000	Dokumen Perda pertanggung jawaban	BPKAD	100%	300.000.000.00	APBD		100%	360.000.000.00
	2.3.4 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 175.000.000	Jumlah peserta	BPKAD	100%	175.000.000.00	APBD		100%	210.000.000.00
	2.4 Penunjang urusan kewenangan pengelolaan Daerah		BPKAD	100%	510.000.000.000.00	APBD		100%	612.000.000.000.00
	2.4.1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan diusulkan sebesar Rp. 430.000.000.000,-	Jumlah bantuan keuangan	BPKAD	100%	430.000.000.000.00	APBD		100%	516.000.000.000.00
	2.4.2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak diusulkan sebesar Rp. 35.000.000.000,-	Jumlah bantuan	BPKAD	100%	35.000.000.000.00	APBD		100%	42.000.000.000.00
	2.4.3 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 45.000.000.000	Bagi hasil yang tersalurkan	BPKAD	100%	45.000.000.000.00	APBD		100%	54.000.000.000.00
	3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.		BPKAD	100%	3.000.000.000.00	APBD		100%	3.600.000.000.00
	3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah		BPKAD	100%	3.000.000.000.00	APBD		100%	3.600.000.000.00

	3.1.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD diusulkan sebesar Rp. 225.000.000,-	Jumlah dokumen RKMD	BPKAD	100%	225,000,000.00	APBD	100%	270,000,000.00
	3.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang diusulkan sebesar Rp. 600.000.000,-	Dokumen Standar harga	BPKAD	100%	600,000,000.00	APBD	100%	720,000,000.00
	3.1.3 Penatausahaan BMD diusulkan sebesar Rp. 850.000.000,-	Dokumen Penatausahaan	BPKAD	100%	850,000,000.00	APBD	100%	1,020,000,000.00
	3.1.4 Pengamanan BMD diusulkan sebesar Rp. 300.000.000,-	Dokumen Pengamanan BMD	BPKAD	100%	300,000,000.00	APBD	100%	360,000,000.00
	3.1.5 Penilaian Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp. 175.000.000,-	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	100%	175,000,000.00	APBD	100%	210,000,000.00
	3.1.6 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp. 450.000.000,-	Dokumen Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	BPKAD	100%	450,000,000.00	APBD	100%	540,000,000.00
	2.4.4 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp. 400.000.000,-	Pesert	BPKAD	100%	400,000,000.00	APBD	100%	480,000,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada rancangan Awal RKPD Pemerintah Daerah yang memuat Program dan kegiatan dengan pagu pendanaan yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan Program perlu didukung kegiatan yang didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh BPKAD Kabupaten Mojokerto yang berpengaruh dan berimplikasi langsung terhadap pencapaian atas Indikator sasaran RPJMD yakni Opini BPK terhadap Akuntabilitas keuangan Daerah dengan target (WTP) dan untuk mempertahankan opini yang telah diraih pada tahun 2020 tersebut, maka BPKAD mengusulkan beberapa Program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan dengan kegiatan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diusulkan sebesar Rp. 50.000.000,-

1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diusulkan sebesar Rp. 75.000.000,-

1.2 Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan tunjangan asn diusulkan sebesar Rp. 33.500.000.000,-

1.3 Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, diusulkan sebesar 100.000.000,-

1.3.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan diusulkan sebesar 500.000.000,0

1.4 Kegiatan Umum Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

- 1.4.1 *Pengadaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor diusulkan sebesar Rp. 35.000.000,-*
- 1.4.2 *Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor diusulkan sebesar Rp. 200.000.000,-*
- 1.4.3 *Penyediaan bahan logistik kantor diusulkan sebesar Rp. 85.000.000,-*
- 1.4.4 *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan diusulkan sebesar Rp. 135.000.000,-*
- 1.4.5 *Penyediaan bahan bacaan dan per UU diusulkan sebesar Rp. 50.000.000,-*
- 1.4.6 *Penyediaan bahan/material diusulkan sebesar Rp. 125.000.000,-*
- 1.4.7 *Fasilitasi Kunjungan tamu diusulkan sebesar Rp. 100.000.000,-*
- 1.4.8 *Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD diusulkan sebesar Rp. 250.000.000,-*

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda

Dengan Sub Kegiatan :

- 1.5.1 *Penyediaan jasa komunikasi, Sda dan listrik diusulkan sebesar Rp. 85.000.000.000,-*
- 1.5.2 *Penyediaan jasa pelayanan umum kantor diusulkan sebesar Rp. 200.000.000,-*

1.6 Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda

Dengan Sub Kegiatan :

- 1.6.1 *Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional dan jabatan diusulkan sebesar Rp. 230.000.000,-*
- 1.6.2 *Pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya diusulkan sebesar Rp. 150.000.000,-*
- 1.6.3 *Pemeliharaan/rehab sarana dan pra sarana gedung kantor dan bangunan lainnya diusulkan sebesar Rp. 75.000.000,-*

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan dengan kegiatan sebagai berikut :

2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran daerah

2.1.1 Koordinasi penyusunan KUa dan PPa diusulkan sebesar Rp. 175.000.000

2.1.2 Koordinasi penyusunan KUPa dan perubahan PpaS diusulkan sebesar Rp. 175.000.000

2.1.3 Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKa SKPD diusulkan sebesar Rp. 350.000.000

2.1.4 Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPa SKPD diusulkan sebesar Rp. 175.000.000

2.1.5 Koordinasi dan penyusunan Perda aPBD dan Perkada tentang Penjabbran aPBD diusulkan sebesar Rp. 400.000.000

2.1.6 Koordinasi dan penyusunan Perda PaPBD dan Perkada tentang Penjabbran PaPBD diusulkan sebesar Rp. 400.000.000

2.1.7 Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang anggaran diusulkan sebesar Rp. 75.000.000

2.1.8 Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan diusulkan sebesar Rp. 175.000.000

2.2 Koordinasi pengelolaan Perbendaharaan Daerah

2.2.1 Koordinasi dan pengelolaan kas daerah diusulkan sebesar Rp. 275.000.000

2.2.2 Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya diusulkan sebesar Rp. 175.000.000

2.2.3 Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jawaban sub kegiatan diusulkan sebesar Rp. 175.000.000

2.2.4 Pembinaan penatausahaan keuangan pemerinth Daerah diusulkan sebesar Rp. 750.000.000

2.3 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan Daerah

2.3.1 Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban diusulkan sebesar Rp. 250.000.000

- 2.3.2 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPa SKPD diusulkan sebesar Rp. 75.000.000
- 2.3.3 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 300.000.000
- 2.3.4 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 175.000.000
- 2.4 Penunjang urusan kewenangan pengelolaan Daerah
 - 2.4.1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan diusulkan sebesar Rp. 430.000.000.000,-
 - 2.4.2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak diusulkan sebesar Rp. 35.000.000.000,-
 - 2.4.3 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 45.000.000.000

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

adalah keseluruhan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Program ini meliputi kegiatan :

- 3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3.1.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD diusulkan sebesar Rp. 225.000.000,-
 - 3.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang diusulkan sebesar Rp. 600.000.000,-
 - 3.1.3 Penatausahaan BMD diusulkan sebesar Rp. 850.000.000,-
 - 3.1.4 Pengamanan BMD diusulkan sebesar Rp. 300.000.000,-
 - 3.1.5 Penilaian Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp. 175.000.000,-
 - 3.1.6 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp. 450.000.000,-

2.4.4 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp. 400.000.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2022 yang akan datang.

Pengelolaan Keuangan yang Baik mengandung maksud mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel, tertib dan disiplin dalam batasan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Visi tersebut merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto, agar dapat berjalan dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun kedepan.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan Visi – Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Target capaian yaitu Opini BPK = WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Mojokerto, Juni 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSI.
Kepala Muda
NIP. 19640731 199003 2 005